

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bratakusumah, Deddy Supriyadi, dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni.
- Kamaludin, Rustian. 2003. *Ekonomi Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, Bagir. 1996. *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Bandar Lampung: FH Unila.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Nasution. 2015. *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sani, Zulfiar. 2010. *Transportasi (Suatu Pengantar)*. Jakarta: UI Press
- Soehino. 1984. *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subakti, Ramlan. 2001. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Suharizal dan Muslim Chaniago. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thofa Media

Sunarno, Siswanto. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Simatupang, Victor M. dan Cormentya. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tamin, Ofyar. Z. 2000. *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung: ITB.

Warpani, Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Bandung: ITB.

Jurnal

Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. ISSN 1978-5186.

Aditya Yuli. 2011. “*City Branding Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Ditinjau dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewu Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Indonesia)*”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, V

Albert Morangki, *Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Urusan di Bidang Pertanahan*. Vol.XX/No.3/April-Juni/2012.

Benediktus Susanto dan Vian Andreas Mambuaru, 2015, “*Analisis Pesyaratan Teknis dan Kebutuhan Becak Motor di Yogyakarta*” *Jurnal FSTPT International Symposium*, Bandar Lampung, 1-8

Ida Bagus Putu Widiarta. 2010. *Analisis Pemilihan Moda Transportasi Untuk Perjalanan Kerja (Studi Kasus : Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali)* Bali: *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*. Vol. 14, No. 2: 218-225

Risdiyanto, dkk. 2015. *Karakteristik Pengemudi, layanan, serta Fisik Becak dan Andong di DIY*. Semarang: *Seminar Nasional Teknik Sipil V Tahun 2015-UMS*, T-91 – T-99

Septi Nur Wijayanti, “*Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23*

Tahun 2004.” Jurnal Media Hukum. Vol.23 No.2 / Desember 2016. hlm.193

Yuliana Trisnawati dan Broto Sunaryo, 2014 “*Keberadaan Moda Transportasi Umum Tidak Bermotor Dalam Mendukung Aktivitas Pariwisata di Kawasan Malioboro Yogyakarta*”, Jurnal Teknik PWK. Vol. 3 No 4, 1019

Yunus Evendi Kris Dia Musa dan Benny Agus Setiono. 2012. “*Pengaruh Moda Transportasi Darat Terhadap Kelancaran Arus Container di PT. Nilam Port Terminal Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya*”. Surabaya: Jurnal Aplikasi Pelayaran Kapal dan Pelabuhan. Vol. 3, No. 1: 10-25.

Yuni Astuti, *Eksistensi Angkutan Becak Dalam Perkembangan Transportasi di Yogyakarta.*

Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah DIY Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah.

Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Yogyakarta.

Kamus

W.J.S Poerwadarminta. 2007. “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”. Jakarta: Balai Pustaka.